

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) terhadap Barang Milik Daerah (BMD) untuk melaksanakan tahapan proses pengolahan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan menggunakan data elektronik. Adapun pengembangan yang terjadi sesuai dengan perubahan peraturan dan dinamika regulasi yang berlaku. Menu-menu yang ada dalam Aplikasi SIMDA BMD dimanfaatkan untuk mencatat serta mengadministrasikan mutasi barang milik daerah. Menunya ialah *file*, *parameter*, *data entry*, proses dan laporan.

SIMDA BMD diimplementasikan oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat pada 16 Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam mengimplementasikannya SIMDA BMD, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kendala seperti tidak adanya regulasi yang mengharuskan penggunaan SIMDA BMD, implementasi integrasi SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan masih kurang optimal dan tidak semua fitur yang ada didalam SIMDA BMD digunakan oleh Pemda.

## 1.2 Saran

Untuk memajukan akuntabilitas keuangan dan kemampuan Pemerintah Daerah penulis memberikan saran agar BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi SIMDA BMD. Hal ini dilakukan agar seluruh Pemerintah daerah yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat mengetahui dan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD yang akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah secara otomatis dengan memanfaatkan data elektronik. BPKP dalam mengimplementasikannya ke Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan bimbingan teknis mengenai cara pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD agar Pemerintah Daerah dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

